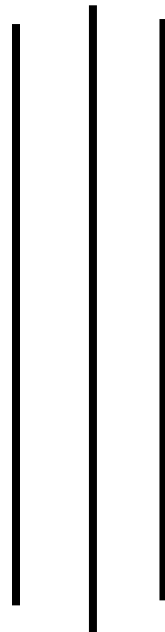




# **PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

## **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

**(LPPD)**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN ANGGARAN 2019**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumba Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat yang kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat yang mempunyai tugas pokok adalah membantu Bupati melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, telah disusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang didalamnya berisikan tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai dalam penyusunan program kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat, sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.

#### **B. TUPOKSI**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumba Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pembantu pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Tugas pokoknya adalah membantu Bupati melaksanakan urusan penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan daerah di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - b. Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
- 4) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengolah Data dan Informasi Penanaman Modal
  - b. Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pengawasan
- 5) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, terdiri atas :
  - a. Seksi Pelayanan Perijinan
  - b. Seksi Pelayanan Non Perijinan

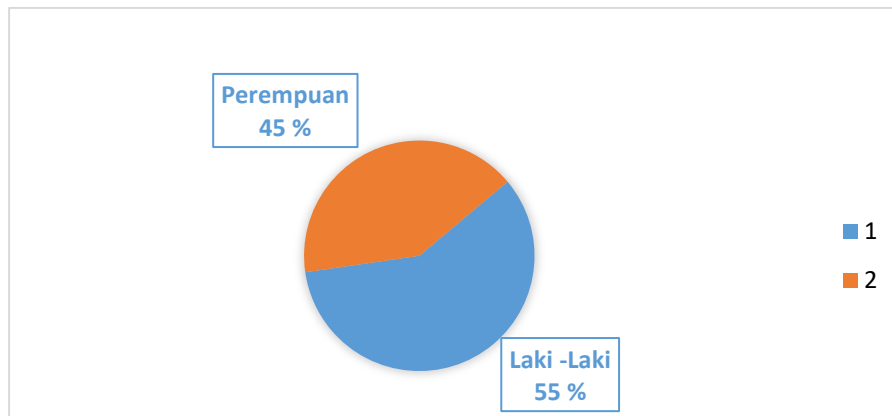
- 6) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri atas :
  - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
  - b. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan

Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat secara lengkap yang menjelaskan koordinasi antara bagian dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

### C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing bidang sampai dengan keadaan 31 Desember 2019 berjumlah 17 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 7 orang (41,18%) dan 10 orang (58,82%) laki-laki.

Gambar 2  
 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  
 Keadaan s/d 31 Desember 2019



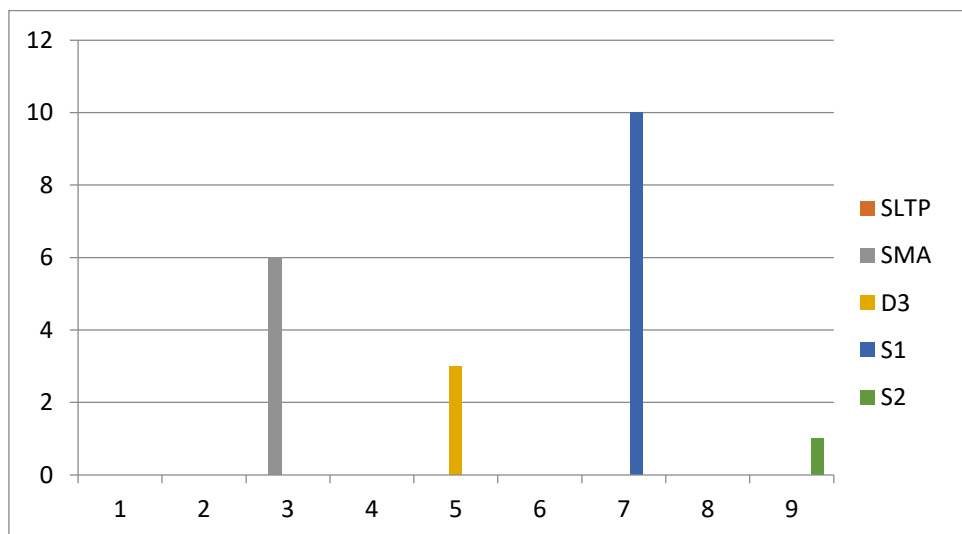
Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPPTSP**  
**Kabupaten Sumba Barat**  
**s/d 31 Desember 2019**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	0	0 %
2	SLTA	6	30 %
3	DIPLOMA III/D-3	3	15 %
4	S1	10	50 %
5	S2	1	5 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	<b>100,00</b>

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat karena sekitar 60 % pegawai sudah berpendidikan sarjana strata 1 dan strata 2. Khusus untuk bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang IT (Ilmu Teknik Komputer) dan teknis perizinan terkait layanan perizinan disamping melalui diklat/substantif. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini :

**Gambar 3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Barat**  
**s/d 31 Desember 2019**



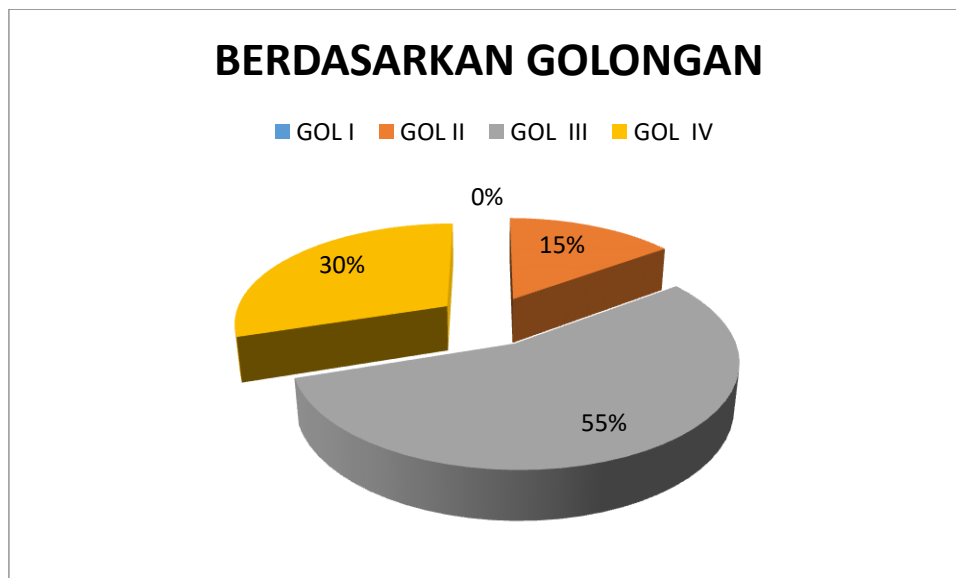
Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2**  
**Daftar Golongan Pegawai DPMPTSP**  
**Kabupaten Sumba Barat**  
**s/d 31 Desember 2019**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Golongan I	0	0 %
2	Golongan II	3	15 %
3	Golongan III	11	55 %
4	Golongan IV	6	30 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	<b>100,00 %</b>

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 100 % pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat adalah golongan III, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 1 dan SLTA. Berikut jumlah PNS DPMPTSP berdasarkan Golongan :

**Gambar 2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Pada DPMPTS Kabupaten Sumba Barat**  
**Keadaan s/d 31 Desember 2019**



Selanjutnya dari Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat yang berjumlah 20

orang masih sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja yang cukup tinggi karena seluruh Perijinan (99 kewenangan izin dan non perizinan) telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat mendapat tambahan tenaga berupa Tenaga Kontrak Daerah (TKD) berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin : 6 (enam) perempuan dan 7 (tujuh) orang laki-laki.

#### D. ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019 seperti termuat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat**  
**Tahun Anggaran 2019**

JENIS BELANJA	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PROSENTASE
Belanja Tidak Langsung	<b>1.260.974.630,-</b>	1.352.188.971,-	100 % +
Belanja Langsung	<b>1.645.305.698,-</b>	1.515.138.993,-	95,26%
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>2.906.280.328,-</b>	<b>2.867.326.964,-</b>	<b>95,26%</b>

#### E. INVENTARISASI ASET.

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai untuk mendukung pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat. Nilai asset yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sumba Barat per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.315.854.944,- semuanya merupakan asset tetap yang terdiri dari Peralatan dan Mesin , Bangunan serta asset tetap lainnya.

Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat per Desember 2019 sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Daftar Aset DPMPPTSP Kabupaten Sumba Barat**  
**Per Desember 2019**

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	<b>ASET TETAP</b>	
1.	Golongan Tanah Tanah	-
2.	Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat besar - Alat-alat angkutan - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat studio dan alat komunikasi	- 11 Unit 61 Unit
3.	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	2 Unit
4.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1 Unit
5.	Golongan Aset Tetap Lainnya Buku	20 Buku

## **F. SARANA DAN PRASARANA**

Disamping sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat belum dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat telah memiliki gedung kantor yang memadai yang dibangun pada tahun 2016 untuk menunjang pelaksanaan tugas secara professional.

Sarana dan prasarana gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat terdiri dari ruangan Kepala Dinas, ruangan Sekretaris, ruang sekretariat, ruangan bidang pelayanan perijinan, ruangan bidang pomosi, ruangan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, ruang bidang pengaduan, ruang rapat dan ruang pelayanan pemohon ijin/front office sekaligus ruang tunggu.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat memiliki 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua.

**Tabel 5**  
**Daftar Kendaraan Dinas**  
**DPMPSTSP Kabupaten Sumba Barat**  
**Tahun 2019**

No.	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan untuk
1.	Mobil	Innova	Operasional Kepala Dinas
2.	Sepeda Motor	Honda (MegaPro)	Operasional Administrasi
3.	Sepeda Motor	Honda (Revo)	Operasional Administrasi
4.	Sepeda Motor	Honda (MegaPro)	Operasional Perijinan
5.	Sepeda Motor	Honda	Operasional Perijinan
6.	Sepeda Motor	Honda	Operasional Perijinan
7.	Sepeda Motor	Yamaha Vision	Operasional Bidang
8.	Sepeda Motor	Yamaha Vision	Operasional Bidang
9.	Sepeda Motor	Yamaha Vision	Operasional Bidang
10.	Sepeda Motor	Yamaha Vision	Operasional Bidang
11.	Sepeda Motor	Yamaha M-King	Operasional Sekretariat

## G. INFORMASI PELAYANAN

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat, jenis pelayanan yang

dilaksanakan adalah pelayanan perijinan dan Non Perijinan serta Pengendalian Investasi. Adapun perkembangan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 6**  
**Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**  
**DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat**  
**Tahun 2019**

<b>TAHUN</b>	<b>PERIZINAN</b>	<b>NON PERIZINAN</b>	<b>TOTAL</b>
2019	197	117	314

**Tabel 7**  
**Realisasi Investasi**  
**DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat**  
**Tahun 2019**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PROSENTASE</b>
2018	150 M	Rp.110,434.284.513,-	73,62 %
2019	150 M	Rp.270.661.765.350,-	Lebih dari Target

Perkembangan pelayanan dasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan promosi penanaman modal kabupaten Sumba Barat dengan indikator terselenggaranya identifikasi, pemutakhiran data potensi telah tercapai dengan telah diterbitkan buku peluang investasi di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 Pameran di Jakarta dan di Kupang.
2. Pelayanan perijinan di Kabupaten Sumba Barat dengan indikator jumlah ijin yang diterbitkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tingkat capaian sebesar 62,2 %, dari target 500 Ijin maka ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 314 Ijin.  
Dalam rangka penyelenggaraan PTSP telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 6.a Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang

Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat berjumlah 99 perizinan dan non perizinan dan maka pada Tahun 2018 Keluar PP nomor :24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan harus melalui OSS.

3. Pelayanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pengendalian penanaman modal. Sudah dilaksanakan pertemuan dengan instansi terkait menyangkut pengawasan terhadap penanam modal dan pengendalian terhadap Laporan Pelaksanaan Hasil Kegiatan yang wajib disampaikan oleh Penanam Modal/Investor melalui SPIPISE dan tercapainya realisasi investasi dari target yang diberikan oleh 150 Miliar pertahun oleh Provinsi dengan nilai investasi **Rp.270.661.765.350,-** Keadaan per 31 Desember tahun 2019.
4. Pelayanan Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan telah membuat inovasi baru lewat Pohon Pengaduan bagi para pemohon yang memiliki Permasalahan dapat melakukan pengaduan.

## BAB II

### DOKUMEN PERENCANAAN

#### A. Rencana Strategis

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Kepala SKPD, dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.

#### Visi

Dalam rangka pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat berdasarkan kewenangan daerah di bidang penanaman modal, agar terarah dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai supaya tercipta kesamaan pandangan dan partisipasi melalui perumusan, masukan, saran-saran, aspirasi dan seluruh bidang-bidang.

Rumusan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat mencerminkan apa yang ingin dicapai selama kurun waktu 2016 – 2021 adalah :

**“Terwujudnya Penanaman Modal Yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta Berbasis Pada Sumber Daya Daerah dan Pelayanan Perizinan Prima”**

#### Misi

Misi suatu instansi pemerintah merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah.

Selaras dengan visi yang telah ditetapkan, Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat merupakan langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten Sumba Barat.

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat, yaitu :

- Mewujudkan peningkatan daya saing daerah
- Mewujudkan pelayanan prima perijinan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Barat merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan yang mendukung pertumbuhan investasi
- Peningkatan Pelayanan Perijinan pada PTSP
- Peningkatan Peluang Potensi Investasi
- Peningkatan Kapasitas Aparatur (SDM)

## **Tujuan dan Sasaran**

### **Tujuan :**

- a. Meningkatnya investasi di Kabupaten Sumba Barat
- b. Meningkatnya pelayanan di bidang penanaman modal dan perijinan
- c. Tersusun dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan menguntungkan bagi para calon investor
- d. Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
- e. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan.

### **Sasaran :**

- a. Meningkatkan jumlah investasi dan penanam modal
- b. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya.

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan
- d. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan guna melayani para calon investor dan pembuat izin.

**Strategi :**

- a. Memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi
- b. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya.
- c. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- d. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Kebijakan :**

- a. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/bagian dan kelembagaan lainnya
- b. Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi
- c. Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadap potensi-potensi investasi
- d. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan
- e. Merumuskan sistem promosi investasi
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan perijinan
- g. Merumuskan sistem peningkatan Sumber Daya Aparatur

**B. RENJA TAHUNAN**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang-Bidang dan Sekretariat Dinas.

Penyusunan program berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sumba Barat sesuai kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat.

Berdasarkan hal di atas, untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, tahun 2019 program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (12 Kegiatan);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (4 Kegiatan);
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2 Kegiatan);
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan (1 Kegiatan);
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (3 Kegiatan);
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (1 Kegiatan);
8. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Prasarana Daerah (1 Kegiatan);
9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri (1 Kegiatan).

Rencana Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>JUMLAH DANA (Rp.)</b>	<b>KET.</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	596.353.098,-	12 Kegiatan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	88.990.100,-	4 Kegiatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	69.079.000,-	2 Kegiatan
4	Program Peningk. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	9.139.800,-	1 Kegiatan

	dan Keuangan		
5	Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan	25.000.000,-	1 Kegiatan
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	261.470.000,-	3 Kegiatan
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	104.449.300,-	1 Kegiatan
8	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Prasarana Daerah	141.759.200,-	1 Kegiatan
9	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	349.065.200,-	1 Kegiatan

### BAB III

#### DATA KINERJA DAN KEUANGAN

##### A. DATA KINERJA SKPD

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019 didukung oleh Dana APBD Kabupaten Sumba Barat sebesar **Rp. 2.906.280.328,-** yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung : **Rp. 1.260.974.630,-**
- b. Belanja Langsung : **Rp. 1.645.305.698,-**

Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (12 Kegiatan);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (4 Kegiatan);
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2 Kegiatan);
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (1 Kegiatan);
5. Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan (1 Kegiatan);
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (3 Kegiatan);
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (1 Kegiatan);
8. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Prasarana Daerah (1 Kegiatan);
9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri (1 Kegiatan).

Jumlah Anggaran yang disediakan oleh APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Program dan Anggaran DPMPTSP**  
**Kabupaten Sumba Barat**  
**Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>JUMLAH DANA (Rp.)</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	596.353.098,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	88.990.100,-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	69.079.000,-
4	Program Peningk. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.139.800,-
5	Program Pameran/Promosi Hasil- Hasil Pembangunan	25.000.000,-
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	261.470.000,-
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	104.449.300,-
8	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Prasarana Daerah	141.759.200,-
9	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	349.065.200,-
	<b>Total</b>	<b>1.645.305.698,-</b>

**B. Kegiatan Tahun 2019**

Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>JUMLAH DANA (Rp.)</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>596.353.098,-</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	18.899.964,-
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10.860.000,-
3	Penyediaan alat tulis kantor	12.865.750,-

4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.770.000,-
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.999.900,-
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000,-
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,-
8	Penyediaan makanan dan minuman	15.999.000,-
9	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	120.800.000,-
10	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	43.535.000,-
11	Penyediaan peralatan dan kebersihan kantor	3.996.300,-
12	Penyediaan tenaga non PNS	268.127.184,-
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>88.990.100,-</b>
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	24.993.900,-
2	Pemeliharaan rutin/ gedung kantor	9.996.200,-
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	50.000.000,-
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	4.000.000,-
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>69.079.000,-</b>
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	39.129.000,-
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	29.950.000,-
<b>IV</b>	<b>Program Peningk. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>9.139.800,-</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	9.139.800,-
<b>V</b>	<b>Program Pameran/Promosi Hasil-Hasil Pembangunan</b>	<b>25.000.000,-</b>
1	Pameran hasil-hasil pelaksanaan pembangunan	25.000.000,-
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama</b>	<b>261.470.000,-</b>

	<b>Investasi</b>	
1	Peningkatan Kemitraan Investasi antar Pengusaha, Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	95.555.000,-
2	Pembuatan Media Promosi Potensi Investasi Daerah	128.540.000,-
3	Pengawasan investasi daerah	37.375.000,-
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>104.449.300,-</b>
1	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi	104.449.300,-
<b>VIII</b>	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Prasarana Daerah</b>	<b>141.759.200,-</b>
1	Identifikasi, pemutakhiran dan publikasi Sumberdaya	141.759.200,-
<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>349.065.200,-</b>
1	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	349.065.200,-
	<b>Total</b>	<b>1.645.305.698,-</b>

### C. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat dengan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebesar Rp. **2.906.280.328,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- **Pendapatan Daerah** : -
- **Belanja Daerah** : pendapatan sebelum Perubahan Rp. 2.809.370.124,- dan setelah Perubahan Rp. 2.906.280.328,- (bertambah Rp. 96.910204,-)
- **Belanja Tidak Langsung** : pendapatan sebelum Perubahan Rp. 1.260.974.630,- dan setelah Perubahan Rp. 1.260.974.630,- (bertambah Rp. 0,-)

- **Belanja Langsung** : pendapatan sebelum Perubahan Rp. 1.548.395.494,- dan setelah Perubahan Rp. 1.645.305.698,- (bertambah Rp. 96.910.204,-)

**Realisasi Anggaran**

No.	Uraian Jenis Belanja	Alokasi Dana (Rp.)
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	
	Belanja Pegawai	1.352.188.971
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	
	Belanja Pegawai	492.866.000,-
	Belanja Barang dan Jasa	1.364.985.143,-
	Belanja Modal	116.363.350,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.326.403.464,-</b>

**D. Data Kinerja Keuangan**

Capaian Kinerja Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

**Realisasi Anggaran Tahun 2019**

<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1,645,305,698</b>	<b>1,515,138,993</b>
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>596,353,098</b>	<b>592,743,113</b>
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI/</b>	<b>18,899,964</b>	<b>17,677,864</b>
<b>SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>		
Belanja Telepon	11,075,964	11,075,964
Belanja Air	3,600,000	3,600,000

Belanja Listrik	4,224,000	3,001,900
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>10,860,000</b>	<b>10,860,000</b>
Honorarium Pengelola Keuangan APBD	9,600,000	9,600,000
Uang Lembur PNS		-
Uang Lembur Non PNS		-
Belanja Perangko, meterai dan Benda Pos lainnya	1,260,000	<b>1,260,000</b>
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>12,865,750</b>	<b>12,865,750</b>
Belanja Alat Tulis Kantor	12,865,750	12,865,750
		-
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>6,770,000</b>	<b>6,770,000</b>
Belanja Cetak	680,000	680,000
Belanja Penggandaan	4,920,000	4,920,000
Belanja Jilid	1,170,000	1,170,000
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1,999,900</b>	<b>1,999,900</b>
Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,999,900	1,999,900
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>90,000,000</b>	<b>89,933,150</b>
Belanja Pengadaan Personal Komputer	90,000,000	89,933,150
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,263,349</b>
Belanja Surat Kabar / majalah	1,020,000	783,349
Belanja Modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	1,480,000	1,480,000
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>15,999,000</b>	<b>15,999,000</b>
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8,319,000	8,319,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,680,000	7,680,000
<b>KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE KELUAR DAERAH</b>	<b>120,800,000</b>	<b>120,214,000</b>

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120,800,000	120,214,000
<b>KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>43,535,000</b>	<b>43,435,000</b>
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43,535,000	43,435,000
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>3,996,300</b>	<b>3,996,300</b>
Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	3,996,300	3,996,300
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA NON PNS</b>	<b>268,127,184</b>	<b>266,728,800</b>
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak tetap	258,960,000	258,960,000
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	9,167,184	7,768,800
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>88,990,100</b>	<b>86,048,080</b>
<b>KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>24,993,900</b>	<b>24,950,200</b>
Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	3,688,900	3,688,900
Belanja Pengadaan Meja dan Kursi Kerja	16,765,000	16,765,000
Belanja Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4,540,000	4,496,300
<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>9,996,200</b>	<b>9,996,200</b>
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	9,996,200	<b>9,996,200</b>
<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>50,000,000</b>	<b>47,101,680</b>
Belanja Jasa Service	17,110,520	17,110,520
Belanja Pergantian Suku Cadang	13,416,400	13,293,300
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15,743,080	15,743,080
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,730,000	954,780
<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	4,000,000	4,000,000

<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>69,079,000</b>	<b>41,818,600</b>
<b>KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN</b>	<b>39,129,000</b>	<b>23,130,600</b>
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,675,000	1,675,000
Belanja alat tulis kantor	1,750,300	1,641,900
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering)	154,700	154,700
Belanja transportasi dan akomodasi	14,900,000	14,350,000
Belanja Dekorasi	300,000	300,000
Jasa Tenaga Ahli /Instruktur / Narasumber	2,100,000	2,100,000
Belanja penggandaan	284,000	284,000
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,000,000	-
Belanja makanan dan minuman kegiatan	2,625,000	2,625,000
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,510,000	-
Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,830,000	-
<b>KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN</b>	<b>29,950,000</b>	<b>18,688,000</b>
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,950,000	18,688,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>9,139,800</b>	<b>9,139,800</b>
<b>KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>9,139,800</b>	<b>9,139,800</b>
Uang Lembur PNS	5,996,000	5,996,000
Uang Lembur Non PNS	1,700,000	1,700,000
Belanja alat tulis kantor	401,800	401,800
Belanja penggandaan	742,000	742,000

Belanja Jilid	300,000	300,000
<b>PROGRAM PAMERAN/PROMOSI HASIL-HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>
<b>KEGIATAN PAMERAN HASIL-HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>
Belanja Bahan Promosi	16,525,000	16,525,000
Belanja Dokumentasi	150,000	150,000
Belanja Upah Tenaga Kerja	3,000,000	3,000,000
Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,325,000	5,325,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI</b>	<b>261,470,000</b>	<b>251,903,900</b>
<b>KEGIATAN PENINGKATAN KEMITRAAN INVESTASI ANTAR PENGUSAHA, PEMERINTAH DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>95,555,000</b>	<b>88,786,200</b>
Belanja Alat Tulis Kantor	900,000	<b>900,000</b>
Belanja Penggandaan	2,150,000	<b>650,000</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	<b>968,000</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50,325,000	<b>50,050,000</b>
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40,680,000	<b>36,218,200</b>
<b>KEGIATAN PEMBUATAN MEDIA PROMOSI POTENSI INVESTASI DAERAH</b>	<b>128,540,000</b>	<b>128,142,700</b>
Belanja Dekorasi	10,575,000	10,575,000
Belanja Cetak	2,000,000	1,997,500
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,640,000	20,495,000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,000,000	2,000,000
Belanja Makan dan Minum Rapat	375,000	375,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92,950,000	92,700,200
<b>KEGIATAN PENGAWASAN INVESTASI DAERAH</b>	<b>37,375,000</b>	<b>34,975,000</b>

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,975,000	27,975,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,400,000	7,000,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</b>	<b>104,449,300</b>	<b>96,192,900</b>
<b>KEGIATAN MEMFASILITASI DAN KOORDINASI KERJA SAMA DI BIDANG INVESTASI</b>	<b>104,449,300</b>	<b>96,192,900</b>
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,500,000	38,500,000
Belanja alat tulis kantor	623,900	623,900
Belanja dekorasi	1,250,000	1,250,000
Belanja Penggandaan	80,400	-
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,875,000	1,875,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,040,000	31,015,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31,080,000	22,929,000
<b>PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA SARANA DAN PRASARANA DAERAH</b>	<b>141,759,200</b>	<b>128,380,400</b>
<b>KEGIATAN IDENTIFIKASI, PEMUTAKHIRAN DAN PUBLIKASI POTENSI SUMBERDAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI</b>	<b>141,759,200</b>	<b>128,380,400</b>
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,700,000	8,700,000
Uang Lembur PNS	4,160,000	4,160,000
Uang Lembur Non PNS	510,000	510,000
Belanja Alat Tulis Kantor	1,190,400	1,190,400
Belanja Cetak	56,875,000	56,875,000
Belanja Penggandaan	28,800	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,125,000	1,125,000
Belanja makanan dan minuman kegiatan	6,150,000	6,150,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		49,670,000

	49,770,000	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,250,000	-
<b>PROGRAM PENINGKATAN EFISIEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	<b>349,065,200</b>	<b>283,912,200</b>
<b>KEGIATAN FASILITASI KEMUDAHAN PERIJINAN PENGEMBANGAN USAHA</b>	<b>349,065,200</b>	<b>283,912,200</b>
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	154,700,000	141,600,000
Uang Lembur PNS	13,820,000	13,815,000
Uang Lembur Non PNS	7,650,000	7,650,000
ATK Kantor	6,690,200	6,690,200
Belanja Inteernet	15,000,000	-
Belanja penggandaan	14,330,000	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,625,000	2,062,000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,710,000	3,960,000
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,250,000	30,245,000
Belanja perjalanan dinas luar daerah	89,590,000	77,890,000
Belanja Modal Pemasangan Internet	3,700,000	-
	<b>2,748,576,528</b>	<b>1,515,138,993</b>

## BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi telah berjalan dengan baik dengan capaian kinerja Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan sebesar 62,2 %, Rp.270.661.765.350,- dan Realisasi Investasi sebesar dan capaian realisasi keuangan sebesar 95,26%.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat disusun untuk menjadi bahan kajian sehingga di tahun mendatang dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan untuk mendapatkan kinerja yang semakin baik dan maksimal.

Waikabubak, Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumba Barat



Ir. MAXI M.O. St. NANGE, M.Si  
NIP. 19641008 199503 1 002

**Ir. MAXI M.O. St. NANGE, M.Si**  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 19641008 199503 1 002